

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di banyak negara, kemunculan Covid-19 telah menjadi masalah berat bagi kesehatan masyarakat (Chung et al., 2020). Lebih lanjut, sektor publik menghadapi berbagai tantangan dan tuntutan yang harus meningkatkan pelayanan yang lebih baik, salah satunya adalah implementasi vaksinasi dan test PCR di masyarakat sebagai solusi alternatif untuk membentuk herd immunity (Emiron Wanimbo, Selvie Tumengkol, 2021). Ditambah etika politik dalam praktik demokratisasi kini menjadi kajian yang mendesak dan menarik setidaknya karena dua alasan; pertama, fenomena jalur politik diduga telah keluar dari jalur etika politik dan moralitas publik. Kedua, munculnya kesadaran untuk berupaya membangun masyarakat yang demokratis dan pemerintahan yang sehat dan bersih (Menendez et al., 2018). Vaksinasi dan test PCR Covid-19 sangat penting untuk memerangi pandemi (Patzina & Dietrich, 2022). Dalam pelaksanaan vaksinasi dan test PCR Covid-19 merupakan cara yang efektif untuk mencegah dan melawan penularan penyakit Covid-19 (Pfattheicher, Petersen, & Böhm, 2022), dan sebagai solusi farmakologis jangka panjang yang tepat untuk menangani Covid-19 (Maserat, Keikha, Davoodi, & Mohammadzadeh, 2021).

Namun, ketersediaan vaksin saja tidak cukup untuk perlindungan imunologi secara keseluruhan: vaksin juga harus diterima dengan baik oleh komunitas kesehatan dan masyarakat umum, agar tidak menimbulkan keraguan dalam penerapannya (Junaedi, Arsyad, Salistia, & Romli, 2022). Keragu-raguan terhadap vaksin merupakan hambatan yang signifikan dalam pelaksanaan vaksinasi untuk mencapai herd immunity di masyarakat dan melindungi populasi yang paling rentan terhadap Covid-19 (Bullock, Lane, & Shults, 2022). Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor biologis, lingkungan, dan sosial-perilaku, ambang herd immunity Covid-19 adalah antara 55% hingga 82% populasi (Sanche et al.,

2020). Hal ini belum bisa terpenuhi secara menyeluruh disemua kelompok, karena kurangnya edukasi dan komunikasi dari pemerintah yang mengakibatkan penolakan vaksinasi (Astuti, Nugroho, Lattu, Potempu, & Swandana, 2021). Ditambah lagi, niat untuk menerima vaksin Covid-19 bervariasi sesuai dengan demografi dari tingkat keparahan virus yang dirasakan (Coe, Elliott, Gatewood, Goode, & Moczygamba, 2022). Sehingga rendahnya capaian pelaksanaan vaksinasi menjadi tantangan dan masalah yang dihadapi negara (Mesa-Vieira, Botero-Rodríguez, Padilla-Muñoz, Franco, & Gómez-Restrepo, 2021). Berdasarkan sumber dari Our World in Data, Indonesia merupakan salah satu negara yang cakupan vaksinasi Covid-19-nya masih rendah dibandingkan negara-negara di kawasan Asia Tenggara, dan sebuah penelitian di Indonesia menemukan bahwa penerimaan Covid-19 dipengaruhi oleh efektivitas vaksin dan risiko yang dirasakan (Faturhman et al., 2021).

Ditambah kebijakan pemerintah dalam menetapkan harga test PCR Covid-19 juga menjadi kontroversi di masyarakat, pemerintah di nilai tidak peduli dengan apa yang dirasakan masyarakat (Mesa-Vieira et al., 2021). Permasalahan yang muncul dari trending tagar #pecatluhut di media Twitter adalah adanya dugaan kaitan dengan pelaku bisnis yang mempermainkan harga tes PCR di Indonesia sehingga masyarakat tidak menghormati jabatan kementeriannya karena pejabat pembantu presiden seharusnya bisa meringankan penderitaan rakyat, Hal ini diperkuat dengan konsistensi majalah dan media online Tempo yang menyoroti Luhut terlibat dalam permainan harga PCR di tengah pandemi covid-19 (Sibaweh, 2021). Tentunya dengan kondisi seperti ini, sangat wajar bila publik bereaksi negatif terhadap Luhut yang tidak menjalankan tugasnya secara profesional, sehingga masyarakat yang aktif di media Twitter terus mengkritiknya (Yustika et al., 2020). Ditambah lagi, Luhut juga memiliki perusahaan yang bergerak di bidang produksi PCR, sejalan dengan jabatan yang diembanya sebagai menteri yang membidangi bidang kemaritiman dan investasi (Y. Nugroho & Syarief, 2022).

Dari semua masalah yang diangkat tentang keragu-raguan vaksin, Edwards dan Haskell mengidentifikasi bahwa ada tiga kategori besar masalah vaksin: (1) kebutuhan vaksin, (2) keamanan vaksin, dan (3) kebebasan memilih (Edwards et al., 2016). Selanjutnya, pelaksanaan vaksinasi bertujuan untuk mengurangi jumlah paparan dan kematian akibat Covid-19 secara substansial; vaksin yang baik dan aman harus diberikan dengan cepat dan luas kepada masyarakat setelah vaksin tersedia (Schaffer Deroo, Pudalov, & Fu, 2020), dan dengan demikian akan menjadi penting dalam mencapai kepercayaan dalam implementasi vaksinasi yang sebenarnya (Harrison & Wu, 2020). Begitupun dengan test PCR Covid-19 dilakukan diagnosis untuk memastikan seseorang tidak terjangkit dengan virus Covid-19, karena cara ini memiliki keakuratan yang tinggi sehingga dapat menekan lonjakan Covid-19 (B. S. Nugroho, Arief, Dharta, Suryani, & Utomo, 2022).

Identifikasi yang telah dilakukan dalam studi pelaksanaan vaksin dan test PCR Covid-19 yang telah dipaparkan dari berbagai sudut pandang; penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan vaksinasi Covid-19 di lima provinsi yang cakupan vaksinasinya masih rendah serta etika politik dalam kebijakan penetapan harga test PCR Covid-19 di Indonesia. Data pelaksanaan vaksinasi dilihat dari situs resmi Covid-19 Kementerian Kesehatan <https://vaksin.kemkes.go.id/> dan berita yang di Cupture dari media nasional <https://www.kompas.com/> untuk mengetahui penyebab rendahnya tingkat vaksinasi masyarakat di lima provinsi, Maluku Utara, Sulawesi Barat, Maluku, Papua Barat, dan Papua. Sedangkan etika politik terhadap kebijakan penetapan test PCR dilihat dengan analisis sentimen pada media Twitter menggunakan tagar *#pecatluhut* karena tagar ini sempat trending dari 1 November 2021 hingga 10 November 2021.

Pada tahap analisis data menggunakan software NVivo12 untuk memvisualisasikan data temuan. Analisis ini melihat secara eksplisit capaian implementasi vaksinasi di lima provinsi untuk membentuk herd immunity dan sentimen etika politik dalam kebijakan penetapan harga test PCR untuk penanganan Covid-19. Lebih lanjut, penelitian ini

mengungkapkan pencapaian *herd immunity* dari perspektif paradigma *New Public Service*. Dimana *New Public Service* memposisikan warga negara sebagai objek utama dalam pemerintahan yang demokratis, masyarakat tidak hanya dilihat secara pribadi, tetapi warga negara adalah bagian dari pemerintah dalam sistem pelayanan publik (Denhardt & Denhardt, 2015c).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana capaian pelaksanaan vaksinasi Covid-19 di lima provinsi untuk membangun *herd immunity* di Indonesia dalam perspektif *new public service*?
2. Bagaimana upaya dalam mendorong percepatan vaksinasi Covid-19 di lima provinsi untuk membangun *herd immunity* di Indonesia dalam perspektif *new public service*?
3. Bagaimana etika politik Luhut Binsar Panjaitan dalam menetapkan kebijakan harga tes *polymerase chain reaction* (PCR) Covid-19?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis capaian vaksinasi covid-19 di lima provinsi terendah di Indonesia untuk membangun *herd immunity* dalam perspektif *new public service*. Dalam penelitian ini berfokus pada provinsi Maluku Utara, Sulawesi Barat, Maluku, Papua Barat dan Papua. Hal ini dilakukan untuk melihat sudah sejauh mana capaian vaksinasi covid-19 tersalurkan pada masyarakat untuk membangun *herd immunity* dalam perspektif *new public service*. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana upaya yang dilakukan pemerintah dalam mendorong percepatan vaksinasi Covid-19 di lima provinsi untuk membangun *herd immunity* di Indonesia dalam perspektif *new public service*. Ditambah bertujuan untuk menganalisis perkembangan kasus Luhut Binsar Panjaitan terkait penetapan harga tes *polymerase chain reaction* (PCR) berdasarkan analisis sentiment dengan tagar *#Pecatluhut* melalui media sosial Twitter.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pemerintah terkait dalam pelaksanaan vaksinasi covid-19 di daerah yang capaian vaksinasinya masih kategori rendah dan menjadi kritikan yang membangun kepada pemerintah terkait kebijakan penetapan harga tes PCR yang telah diambil. Tentunya diharapkan adanya keterlibatan berbagai lapisan pemerintah pusat dan daerah untuk dapat bersinergi dalam membangun *herd immunity* dimasyarakat dengan penerapan dan memahami konseptual dari *new public service*. Penulis juga telah menyadari dari awal dengan keterbatasan sumber daya dan waktu yang dimiliki, sehingga tidak memungkinkan penulis untuk menjelaskan strategi dalam percepatan pelaksanaan vaksinasi covid-19 secara global di seluruh dunia untuk membangun *herd immunity* dengan perspektif *new public service* yang digunakan sebagai acuan konseptual dari penelitian ini.

Namun, hasil penelitian ini setidaknya dapat memberikan solusi dan menjawab perdebatan-perdebatan yang terjadi dikalangan akademis mengenai alternatif yang dapat diambil oleh pemerintah untuk mendorong percepatan capaian vaksinasi covid-19 di daerah-daerah yang masih kategori rendah untuk membangun *herd immunity* dalam perspektif *new public service*. Dengan demikian, terciptanya pelayanan yang baik dan dapat diterima dimasyarakat, sehingga daerah yang masih kategori rendah dalam capaian vaksinasi covid-19 dapat membangun *herd immunity* dengan baik sesuai apa yang diinginkan oleh pemerintah. Kondisi ini juga dibutuhkan adanya etika politik yang baik harus dibangun, agar kebijakan penetapan harga tes PCR dapat diterima dimasyarakat.

1.4.2 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan menjadi kajian yang bermanfaat pada pemerintah untuk mengatasi daerah-daerah yang masih kategori rendah dalam pelaksanaan vaksinasi covid-19 dalam membangun *herd immunity* dengan mengembangkan *conceptual framework new*

public service. Ditambah analisis konten #pecatluhut dalam kebijakan penetapan harga tes PCR menggunakan *conceptual framework dimensions of political ethics*. Khususnya, menghadirkan pelayanan yang dekat dengan masyarakat. Selain itu, penelitian ini juga memberikan analisa bagaimana *conceptual framework new public service* yang ideal untuk dapat dilaksanakan pemerintah dalam membangun *herd immunity* capaian vaksinasi covid-19. Serta menyajikan *conceptual framework dimensions of political ethics* yang objektif untuk mengandaikan hak atas kebebasan dan keadilan, termasuk kesejahteraan dan kedamaian yang dirasakan oleh rakyat dalam penetapan kebijakan tes Polymerase Chain Reaction (PCR) yang diambil oleh Luhut Binsar Pandjaitan selaku Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Republik Indonesia.